

PANDANGAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM KASUS BULLYING DI MEDIA SOSIAL

Juandanilsyah, Ayu Larasati

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: juandanilsyah@esaunggul.ac.id, ikom,ayu.lr@esaunggul.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai intimidasi yang terjadi dalam komunikasi politik melalui media sosial selama kampanye di Jakarta. Untuk menginvestigasi fenomena bullying dalam interaksi politik melalui media sosial publik di Jakarta, digunakan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: 1) Bullying politik merupakan berita yang dibicarakan paling banyak saat kampanye pemilihan presiden 2019, yang berdampak negatif pada persatuan sosial, empati antar Agama. 2) Pemberitaan yang berasal dari YouTube terbukti memiliki pengaruh terbesar terhadap pola pikir masyarakat Jakarta dalam diskusi politik di warung kopi. 3). Kekerasan politik mempengaruhi perubahan dalam keputusan politik dalam PILPRES 2019 selama masa kampanye. Sekitar 70% konten berita di media sosial berasal dari laporan yang dijadikan dasar dalam komunikasi politik. Dengan memperhatikan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak informasi mengenai pelecehan politik yang dibagikan oleh masyarakat kota Jakarta melalui media sosial, semakin besar tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga persaudaraan serta menciptakan praktik berpikir yang sehat di platform tersebut.

Kata Kunci: media sosial, etnografi, politik, bullying

Abstract

In this paper, we explore the ethnographic aspects of bullying within political communication on social media during the campaign period in Jakarta. Our aim is to investigate how bullying manifests in the context of political discourse on social platforms in the city, a qualitative descriptive model was used. The study identified four key conclusions: 1) News about political bullying was the most widely consumed during the 2019 presidential election in Jakarta, negatively impacting social cohesion, solidarity, and the culture of empathy between Muslim and Christian communities. 2) YouTube news was found to have the strongest influence on the mindset of Jakartans in political discussions in informal settings like coffee shops. 3) Political violence has adverse effects on political dynamics, causing resistance to political shifts. Reports used in political communication account for approximately 70% of news content on social media, leading to an increase in politically- focused discussions shared by the public.

Keywords: bullying, politics, social media, ethnography

PENDAHULUAN

Untuk memahami mengapa *bullying* dalam komunikasi politik telah menjadi budaya di Indonesia, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai kecenderungan menjaga kehormatan individu selama masa kampanye (Widodo, 2017). Dari sudut pandang etnografi komunikasi, fenomena Pelanggaran terkait politik di platform media sosial justru memperburuk ketersediaan informasi terkait masalah ini (Suryadi, 2018). Stigma terkait intimidasi dalam komunikasi politik mencakup berbagai isu, seperti tenaga kerja asing dari Tiongkok (Dwi Nirwanto, 2023), keberadaan PKI, penghapusan Kemenag, pandangan bahwa Megawati meragukan dukungan suara dari umat Islam (Indra et al., 2021). Hal ini merupakan hasil penyelidikan mengenai persepsi, terutama yang terkait dengan ingatan masyarakat Kota Jakarta, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 11 Maret 2019. Selain itu, terdapat anggapan bahwa legalisasi LGBT akan terwujud jika calon presiden tertentu berhasil menang dalam pemilihan (Noorikhsan et al., 2023).

Di tengah kampanye Pilpres 2019, materi mengenai *bullying* dalam komunikasi politik yang ditujukan kepada calon presiden dan wakilnya disajikan secara tidak baik di dunia maya. Oleh karenanya, penting untuk melakukan penelitian guna menemukan konsep inovatif yang dapat diterapkan dalam komunikasi politik yang sehat di media sosial dan ruang publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan bahwa sejak awal kampanye hingga saat ini, telah terdeteksi sekitar 1.000 berita hoaks. Berita palsu tersebut menargetkan calon presiden dan wakil presiden. Mesin pemantauan kami telah menemukan lebih dari seribu konten palsu yang berkaitan dengan isu politik, instrumen pendukung, serta partai dan kampanye menjelang pemilihan presiden (Kabiro Humas (Plt), 2018).

Selain itu, Kombes Pol Firman Nainggolan, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jakarta, mengajak jurnalis media sosial di Kota Jakarta untuk berperan aktif melawan penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat membahayakan masyarakat (Romadhoni et al., 2023). Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di pagi hari, Firman menekankan pentingnya penghentian praktik tersebut oleh para jurnalis. Mengingat bahwa fenomena *bullying* politik dalam komunikasi ini terjadi, penting untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi strategi dakwah di media sosial. Strategi ini dapat berfungsi sebagai bagian dari dakwah digital yang mendukung sistem politik yang efektif di platform media sosial. Ia mengungkapkan bahwa pada Banyak akun digunakan selama tahun politik 2018 untuk menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk merusak reputasi pesaing politik melalui intimidasi. Tradisi intimidasi politik ini meliputi penyebaran informasi yang mengandung ancaman, kebohongan, fitnah, kampanye hitam, atau berita hoaks (Romadhoni et al., 2023).

Polda, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Jakarta mengimbau kepada pekerja media digital untuk dapat berkolaborasi dengan kepolisian dalam upaya mencegah penyebaran hoaks dan pelecehan politik di media sosial, khususnya di Kota Jakarta. Media memiliki tanggung jawab untuk melaporkan peristiwa yang sedang berlangsung terkait *bullying* politik. Namun, Firman menegaskan bahwa media juga perlu memahami undang-undang yang mengatur pelanggaran tersebut. Ia menginginkan agar komunitas media daring di Jakarta berperan aktif dalam menyelesaikan tugas ini, yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap jejaring sosial serta mencegah terjadinya *bullying* politik dan ujaran kebencian terhadap tokoh-tokoh nasional selama masa kampanye.

Dell Hymes berpendapat bahwa peristiwa tutur dan aturan-aturan yang membentuk bahasa dalam ritual dabus merupakan elemen utama yang menggerakkan ritual tersebut. Teori ini digunakan sebagai alat untuk memahami elemen yang krusial dalam sistem budaya, etnografi dari intimidasi politik dapat terlihat melalui cara orang berkomunikasi. Hymes menggunakan istilah "etnografi komunikasi politik." Bahasa menjadi landasan dan "dihuni" oleh sebuah budaya karena bahasa membentuk komunikasi. Tanpa adanya komunikasi dalam budaya, bahasa tidak akan memiliki makna.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghindari intimidasi politik dan mengeksplorasi filosofi media sosial sebagai alat untuk intimidasi politik. Berdasarkan pandangan Hymes, fenomena ritual dabus dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang tercermin dalam masyarakat kota Ambon. Pandangan ini menjadi dasar untuk mengungkap makna intimidasi politik dalam konteks etnografi *bullying* politik. Menurut Dell Hymes, etnografi *bullying* politik melibatkan penggunaan linguistik sebagai sarana untuk mengubah makna ujaran kebencian menjadi bentuk *bullying* politik di media sosial. Keunikan dan inovasi dalam kajian ini menjadikannya penting, sebagaimana tergambar dalam penelitian tersebut. Hal ini berujung pada munculnya intimidasi politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi bullying politik menjadi *bullying* politik berbasis media melalui platform seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *YouTube*. Pertanyaan-pertanyaan berikut akan menjadi fokus penelitian ini: bagaimana komunikasi etnografi tentang bullying politik berlangsung di media sosial di Kota Jakarta dan bagaimana elemen-elemen yang terlibat dalam proses tersebut?

METODE PENELITIAN

Data dikumpulkan secara elektronik dari komunitas di Jakarta yang terhubung melalui grup *WhatsApp*, *Facebook*, dan *YouTube*. Untuk memahami fenomena pelecehan politik, digunakan perspektif komunikasi etnografi dari Hymens. Ia berpendapat bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membentuk cara masyarakat berkomunikasi dalam konteks politik dan demokrasi. Menurut metode tafsir maudhu'i yang dikemukakan oleh Abu Hayyan, setiap berita memiliki teks, makna, dan konteks yang perlu dianalisis sesuai dengan metodologi tertentu. Dari perspektif aksiologi, pendekatan komunikasi empati digunakan sebagai alat untuk menilai isi berita yang berkaitan dengan pelecehan politik di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam terminologi bahasa Inggris, "*bullying*" berasal dari kata yang memiliki arti seperti banteng yang gemar menyerang ke segala arah. Dalam bahasa Indonesia, istilah "*bully*" merujuk pada seseorang yang mengganggu atau menindas orang lain yang lebih lemah. Olweus menyatakan bahwa intimidasi adalah perilaku negatif yang secara sengaja membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terluka dan dilakukan berulang kali. Berdasarkan pemahaman ini, bullying politik dapat diartikan sebagai perilaku intimidatif dan mengganggu yang dilakukan oleh kandidat di media sosial sepanjang kampanye, dari bulan Januari hingga masa tenang pada 13 April 2019 (Siregar & RI, 2019).

Dell Hymes memperkenalkan konsep etnografi bahasa (etnografi berbicara) pada tahun 1962, yang kemudian dikembangkan menjadi etnografi komunikasi (Saleh, 2018). Studi etnografi komunikasi ini menitikberatkan pada peran bahasa dalam interaksi komunikasi dalam suatu masyarakat; atau dengan kata lain, meneliti bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai kelompok budaya. (Murdawati Nurfaidah, 2018: <http://www.ariesrutung>).

Hymes kemudian mengubah konsep etnografi percakapan menjadi etnografi komunikasi, dengan alasan bahwa kerangka acuan yang digunakan lebih menekankan pada komunikasi daripada sekadar bahasa. Menurut Hymes, perasaan tidak dapat muncul tanpa adanya komunikasi. (Dell, 2018: <https://duniyasosiolinguistik.wordpress.com>). Pandangan komunikasi dalam Islam mengenai penciptaan perasaan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif menurut Abu Hayyan. Dalam pandangan Abu Hayyan, komunikasi yang efektif meliputi penyebaran *bullying* politik melalui teks, penggunaan kontes sebagai alat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam.

Salah satu cabang ilmu antropologi budaya yang disebut sebagai etnografi komunikasi intimidasi politik menganalisis berbagai budaya masyarakat, termasuk proses kampanye pemilihan. Kampanye ini dilihat sebagai ekspresi budaya manusia yang memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang berasal dari alam bawah sadar dalam aktivitas masyarakat. Historiografi ini mengungkapkan bahwa intimidasi dalam komunikasi politik tidak melibatkan seluruh pejabat atau penguasa yang mungkin menjadi sasaran. Salah satu contohnya terlihat ketika masyarakat di Jakarta menyaksikan pemilihan presiden (PILPRES) diserang oleh berita yang berisi tentang intimidasi komunikasi politik. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh informan adalah bahwa pelecehan dalam komunikasi politik telah mengganggu akal sehat kita. Hal ini disebabkan oleh dampak

negatif terhadap etika dan estetika komunikasi yang kita miliki, terutama akibat informasi yang kita terima setiap hari melalui platform seperti YouTube, WhatsApp, dan Facebook selama kampanye Pemilihan Presiden dari Januari hingga 13 April 2019.

Akibat dari *bullying* dalam komunikasi politik yang terjadi ketika istri Nabi tiba di Madinah, banyak penduduk Madinah berbicara tentang istri Nabi yang dituduh sebagai ahlul ifki. Historiografi mengenai ahlul ifki, atau pelecehan, dapat dijadikan pelajaran bagi kondisi sosial di era modern ini, di mana kampanye media sosial sering kali dipenuhi dengan berita pelecehan yang menargetkan pemimpin nasional. Deskripsi budaya ini dapat dianggap sangat berbahaya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Komunikasi berupa *bullying* politik yang dilakukan oleh berbagai suku dan etnis di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka dikenal sebagai etnografi (Junaedi, 2020).

Etnografi komunikasi merupakan suatu cabang ilmu dari *etnolinguistik* atau *sosiolinguistik* yang fokus mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan berbagai variabel yang berada di luar bahasa itu sendiri. Variabel-variabel tersebut meliputi budaya etnis serta faktor sosial lainnya. Faktor sosial mencakup status sosial, tingkat pendidikan, usia, kondisi ekonomi, jenis kelamin, dan berbagai aspek lainnya. Di samping itu, variabel situasional juga berperan penting, seperti identitas pembicara, gaya bahasa yang digunakan, audiens yang dituju, waktu, tempat, serta topik yang dibahas, yang semuanya dapat memengaruhi bentuk bahasa yang digunakan.

Tujuan Etnografi Komunikasi: Etnografi merupakan bidang ilmu yang masih tergolong baru, namun telah banyak diterapkan sebagai metode penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami cara penggunaan bahasa dalam konteks budaya tertentu untuk berkomunikasi. Etnografi komunikasi juga bertujuan untuk mengamati bagaimana bahasa membentuk dan berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Kusworo 2008: 21). Mendapatkan analisis tentang cara budaya sosial masyarakat berkomunikasi melalui elemen bahasa yang digunakan dan dikomunikasikan.

Selama kampanye Pemilihan Presiden 2019, komunikasi politik yang bersifat *bullying* menjadi hal yang dominan dalam ruang publik. Dari sudut pandang etnografi komunikasi yang dikemukakan oleh Dell Hymens, dapat disimpulkan bahwa bahasa digunakan untuk mengekspresikan kepentingan pribadi dalam berkomunikasi. Akibatnya, budaya masyarakat, yang mencakup bahasa, hukum, seni, adat istiadat, agama, dan kebiasaan, mengalami reduksi menjadi bentuk intimidasi dalam komunikasi selama kampanye.

Kasus Bullying Komunikasi Politik

Kasus pelecehan komunikasi politik (BKP) merujuk pada perilaku negatif yang terjadi secara berulang selama kampanye pemilihan presiden (PILPRES), yang tersebar melalui platform seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *YouTube*. Dalam konteks ini, terdapat penyebutan nama Jokowi dengan sebutan yang tidak jelas, seperti PKI, Cina, dan lainnya. Berita ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *bullying* dalam komunikasi politik, karena bertujuan untuk menimbulkan ketidaksenangan atau menyakiti seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Pada tahun 2006, *American Psychiatric Association* (APA) mendefinisikan pelecehan sebagai suatu bentuk perilaku agresif yang memiliki tiga ciri utama: (a) adanya perilaku merugikan atau berbahaya, (b) perilaku tersebut terjadi berulang kali dalam periode waktu tertentu, dan (c) terdapat ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat.

(Qamaria et al., 2023) mendefinisikan *bullying* sebagai bentuk intimidasi yang terjadi secara berulang, di mana pihak yang lebih kuat menyerang pihak yang lebih lemah. Tindakan ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyebabkan luka fisik atau emosional pada korban (Rachmawati, 2024). Sejak penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, data ini juga terlihat di kota Jakarta, di mana informasi tersebut disebarluaskan secara luas melalui *WhatsApp*, *Facebook*, dan *YouTube*. (Syahputra, 2019) menyatakan

bahwa fakta bahwa etnografer yang terlibat dalam pelecehan komunikasi politik ini menyebarkan berita tentang pelecehan komunikasi politik ke ruang publik Jakarta menyebabkan kemajuan demokrasi di Indonesia terhambat.

Pada tahun 2008, Rigby menyatakan bahwa *bullying* dalam komunikasi politik merupakan bentuk perilaku agresif yang terjadi secara berulang dan terus-menerus, dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah untuk menyakiti serta menekan korban. Di Jakarta, masyarakat memanfaatkan efek ini sebagai alat konsumsi politik, terutama di rumah kopi, tempat mereka berkumpul untuk mengekspresikan kondisi psikologis mereka terkait dengan komunikasi politik yang mengalami *bullying*. Masyarakat di kota Jakarta merespons tindakan *bullying* komunikasi politik yang dilakukan oleh komunitas Kristen pendukung capres Jokowi dengan membalas menggunakan taktik serupa terhadap para pendukung Prabowo. Pertarungan dalam *bullying* komunikasi politik ini melibatkan individu dengan inisial NP (Prabowo), IH (Jokowi), dan RA (pendukung Jokowi).

Etnografi mengenai *intimidasi* dalam komunikasi politik yang berlangsung di kota Jakarta antara Januari dan April 2019 mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, *gintimidasi* dalam komunikasi politik menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara kemampuan analisis publik dan nada yang muncul, di mana sebagian besar publik kurang memiliki daya kritis dan cenderung menerima *bullying* politik secara keseluruhan. Selain itu, etnografi ini juga menunjukkan bahwa tujuan *bullying* dalam komunikasi politik adalah untuk menyakiti serta menciptakan ancaman terhadap pasangan tertentu, yang berpotensi mengganggu keterlibatan publik.

Di samping itu, *bullying* dalam komunikasi politik memanfaatkan ketidak seimbangan kekuatan dan kekuasaan, yang membuat korban sulit untuk membela diri dari serangan berita yang bersifat *bullying*. Serangan tersebut seringkali melibatkan stigmatisasi negatif, seperti tuduhan menjadi PKI, keturunan Cina, atau antek asing. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai korban pelecehan jika mereka mengalami tindakan tersebut setidaknya dua hingga tiga kali dalam sebulan. Korban *bullying* dapat mengalami satu atau lebih jenis *bullying*. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami hanya satu jenis *bullying* tetapi terjadi minimal dua hingga tiga kali dalam sebulan tetap dianggap sebagai korban *bullying*. Dalam kasus pelecehan politik yang dirasakan oleh masyarakat, ditemukan bahwa beberapa individu memanfaatkan platform seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *YouTube* untuk menyebarkan pelecehan tersebut.

***Bullying* Teks**

Salah satu aspek pelecehan politik yang sangat bertentangan dengan prinsip komunikasi Islam adalah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh pasangan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo, yang dipandang sebagai representasi kelompok Kristen dan Tionghoa. Tindakan *bullying* politik ini melibatkan Dai Kondan Ustadz UAS dan sering diberitakan di tengah masyarakat. Akibat dari praktik *bullying* dalam komunikasi politik ini, reputasi dan kepercayaan seorang tokoh nasional, yang sebelumnya dianggap sebagai warga NKRI, mengalami penurunan. Menurut Dell Hymens, etnografi komunikasi mencakup aspek bahasa, cara bertutur, pola komunikasi, serta budaya komunikasi yang berperan dalam praktik *bullying* dalam konteks komunikasi politik. Selama proses komunikasi politik, distribusi teks, foto, dan video melalui platform seperti *WhatsApp* dan *Facebook* dapat memengaruhi kesantunan di kalangan karyawan tertentu.

Jika teori ini diterapkan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat kota Jakarta mengalami transformasi dalam mengatasi *bullying*, komunikasi politik berlangsung antara para pendukung yang saling memengaruhi. Informasi dapat diakses dan dibagikan melalui platform seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *YouTube*. Di antara para pendukung, terdapat pergeseran dalam model *bullying* komunikasi politik. Abu Hayyan berpendapat bahwa

perbedaan cara orang dalam membaca dan memahami teks menyebabkan makna yang berbeda-beda terkait keyakinan. Hal ini mengakibatkan dampak intimidasi dalam komunikasi politik tidak berpengaruh pada keputusan politik kandidat tertentu. Di sini, disajikan data mengenai efek intimidasi komunikasi politik selama kampanye Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) di kota Jakarta.

Menurut Au Hayyan, yang sependapat dengan Dell Hymen, masyarakat dengan daya nalar rendah cenderung mudah terpengaruh oleh *bullying* dalam komunikasi politik. Hal ini terjadi karena mereka kesulitan menyaring informasi dan memilah berita, yang membuat mereka sulit mengambil keputusan (Arbi, 2019: 45). Situasi ini menunjukkan bahwa intimidasi dalam komunikasi politik menguji kesehatan mental, kekuatan berpikir kritis, serta kemampuan seseorang dalam mempertahankan keputusan tertentu.

Bullying Video

Dalam konteks demokrasi, penggunaan istilah PKI untuk menghakimi calon presiden (CAPRES) dapat menciptakan stigma negatif. Tindakan *bullying* dalam komunikasi politik, seperti pengeditan video untuk mengubah makna video asli demi kepentingan tertentu, juga merupakan masalah. Pada pemilihan presiden (PILPRES) di Jakarta, komunitas yang terlibat dalam *bullying* komunikasi politik berfokus pada penyerangan terhadap kelompok yang tidak memiliki akses ke teknologi dan mereka yang memiliki daya kritis yang rendah. Dell Hymens menyatakan bahwa bahasa memiliki pengaruh signifikan terhadap cara masyarakat berkomunikasi dalam konteks politik dan demokrasi.

Menurut aksiologi, komunikasi empati digunakan untuk menilai berita tentang pelecehan politik di media sosial (Herman Sjahruddin et al., 2023). Menurut penelitian ini, ada empat jenis intimidasi politik yang diidentifikasi: 1) Teks berita, yang merupakan jenis intimidasi politik yang paling sering digunakan selama kampanye pemilihan presiden di kota Jakarta. 2) Intimidasi politik telah mengganggu persatuan sosial, persaudaraan, dan budaya empati antar agama. 3) Selama masa kampanye, pelecehan politik yang disebarluaskan melalui video di *WhatsApp*, *Facebook*, dan *YouTube* memiliki dampak yang signifikan terhadap pilihan politik dalam pemilihan presiden. 4) Sekitar 70% konten yang beredar di media sosial berisi argumen komunikasi politik. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak informasi mengenai pelecehan politik yang disampaikan oleh masyarakat kota Jakarta di media sosial, semakin sulit bagi mereka untuk menjaga persaudaraan dan menciptakan praktik berpikir yang sehat.

Masyarakat Jakarta mengalami dampak negatif akibat *bullying* dalam komunikasi politik, yang mengakibatkan dominasi ekspresi berita melalui foto, video dan teks yang disebarluaskan melalui dunia maya. Pemberitaan pelecehan politik menjadi yang paling banyak memengaruhi masyarakat di kota Jakarta. Data terkait pelecehan politik ini disimpan di ponsel pribadi untuk digunakan sebagai argumen saat berdiskusi tentang politik di warung kopi. Meskipun demikian, berkat ketahanan psikologis dan keyakinan politik yang kuat, pelecehan politik tersebut tidak memengaruhi pilihan politik masyarakat Jakarta. Fakta bahwa gubernur terpilih Murat Ismail didukung oleh PDIP juga memperkuat argumen ini, yang mengakibatkan *bullying* politik terhadap capres 01 tidak berdampak signifikan.

Bullying Foto

Komunikasi politik yang terdistorsi melalui foto terjadi ketika mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap umat Kristiani. Kejahatan *bullying* dalam komunikasi politik melalui manipulasi foto terus berlangsung di dunia maya. Pengguna media sosial memanfaatkan aplikasi desain grafis untuk mengedit, mengolah, dan mengubah foto demi mendukung aksi *bullying* dalam komunikasi politik. Bagi orang awam, sulit membedakan foto asli dengan yang telah dimanipulasi menggunakan Photoshop. Keterampilan yang dimiliki oleh programmer dan desainer dalam komunitas yang terlibat

dalam bullying komunikasi politik memungkinkan mereka untuk memanipulasi foto demi kepentingan tersebut.

KESIMPULAN

Sejak adanya perubahan jadwal kampanye, media sosial di kota Jakarta mengalami peningkatan berita terkait *bullying* politik. Meskipun terdapat kekuatan intimidasi politik, hal ini tidak banyak memengaruhi pilihan politik masyarakat Jakarta, terutama di kalangan komunitas Kristen di Jakarta yang memiliki iman politik yang kuat. Di Jakarta, terdapat tiga metode dalam melakukan bullying politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Nirwanto, S. (2023). Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Perkembangan Politik Indonesia Pada Film *Soe Hok Gie* (Telaah Semiotika Charles Sanders Peirce). IAIN Ponorogo.
- Herman Sjahruddin, S. E., Sulistiani, I., Kom, M. I., Fahrizal, H. M., Nurrachmah, S., Kom, M. I., Syarifah Novieyana, S. E., Arini, D. U., MM, P., & Ali, I. H. (2023). MANAJEMEN KOMUNIKASI. Cendikia Mulia Mandiri.
- Indra, D., Wahid, U., & Magister, P. (2021). Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik Anies Baswedan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 228–239.
- Junaedi, F. (2020). Etika Komunikasi di Era Siber: Teori dan Praktik.
- Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109.
- Qamaria, R. S., Pertiwi, F. H., Mulyani, L. N., Sari, N. N., Harriroh, A., Haq, I. N., Nasihatini, S. S., Erlangga, S. A., Anisahab, A., & Jannah, M. (2023). Upaya Menciptakan Lingkungan Sekolah Ramah Anak Melalui Kampanye Stop Bullying. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 33–46.
- Rachmawati, D. (2024). Bullying dan dampak jangka panjang koneksi dengan kekerasan dan kriminalitas. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 9(1), 83–104.
- Romadhoni, M. T. B., Heru, M. J. A., Rofiqi, A., Hasanah, Z. W., & Yani, V. A. (2023). Pengaruh perilaku bullying terhadap interaksi sosial pada remaja. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 11(1), 165–189.
- Saleh, R. (2018). Kajian Etnografi Komunikasi Pada Pengguna Aplikasi Chatting Menggunakan Model SPEAKING Dell Hymes.
- Siregar, F. E., & RI, A. B. P. P. (2019). Mengawasi Media Sosial dalam Proses Pemilu 2019. *TIM PENYUSUN*, 171.
- Suryadi, E. (2018). Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syahputra, I. (2019). Media Relations: Teori, Strategi, dan intelijen. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Widodo, A. (2017). Komunikasi Bully. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Dell Hymes, *Ethnography of Communication: SPEAKING Dell Hymes dan Peristiwa Tutur (Speech Event)* oleh: Endah Ratna <https://duniayasosiolinguistik.wordpress.com/2013/06/11/speaking-dellhymes-dan-peristiwa-tuturspeech-event/>. Diakses pada tanggal 5 November 2024.
- Dell Hymes, *The Legacy of: Ethnopoetics, Narrative Inequality, and Voice (Encounters: Explorations in Folklore and Ethnomusicology)*.

<https://terasmaluku.com/ditkrimsuspolda-maluku-gandeng-mediasiber-ambon-lawan-hoax-danhate-speech/>. Diakses pada tanggal 5 November 2024.